

# LAPORAN KEGIATAN BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN TAHUN 2024



BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
TAHUN 2024

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat-Nya dalam mengiringi segenap langkah kita hingga dapat menunaikan tanggung jawab kelembagaan Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dapat terlaksana dengan baik.

Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia, Monitoring Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah, Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan dan Sinkronisasi Pemantauan Pasokan, Stok dan Harga Pangan Pokok Strategis dapat dilaksanakan untuk memastikan upaya pemenuhan kebutuhan akan pangan pokok di tingkat masyarakat yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan ketahanan pangan di tingkat masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini tidak terlepas dari kerjasama banyak pihak mulai dari kepala Dinas Ketahanan Pangan dan jajarannya hingga masyarakat. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Kefamenanu, 15 Januari 2025  
Kepala Bidang Distribusi dan  
Cadangan Pangan

Antonius T. Seran, SP  
NIP. 197306151994021003



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. DASAR HUKUM .....	5
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.4. SASARAN .....	6
1.5. OUT PUT .....	7
1.6. OUT COME / HASIL .....	7
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN .....	8
2.1. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN .....	8
2.2. PEMBIAYAAN .....	9
BAB III HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN .....	10
BAB IV PENUTUP .....	22
4.1. KESIMPULAN .....	22
4.2. SARAN .....	22
4.3. PENUTUP .....	23

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pangan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, beragam, terjangkau dan tidak bertentangan dengan keyakinan dan kebudayaan. Permasalahan utama dalam pemenuhan kebutuhan pangan adalah jumlah penduduk yang memiliki tren meningkat dan masalah kemiskinan sebagai salah satu indikasi menurunnya tingkat kesejahteraan yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat.

Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Penyelenggaraan pangan bertujuan diantaranya adalah mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat terutama masyarakat rawan pangan dan gizi.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkomitmen dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi rumah tangga dan perseorangan dengan melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang cadangan pangan, distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok melalui beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan yaitu :

- 1) Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia;
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stock, Pasokan dan Harga Pangan Strategis;
- 3) Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten / Kota;
- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Upaya Pemerintah dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Ketahanan pangan adalah dengan menetapkan Cadangan Pangan Nasional yang terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022, dimana diatur penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dapat dilakukan untuk menanggulangi pengentasan kemiskinan, menangani kerawanan pangan, menanggulangi kekurangan pangan, mengendalikan gejolak harga pangan dan inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen. Disamping itu, penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah juga dapat dilaksanakan dalam rangka antisipasi, mitigasi dan/atau pelaksanaan pemberian bantuan pangan.

Pengelolaan cadangan pangan masyarakat dilakukan melalui pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). Persoalan pangan tidak semata menjadi domain tanggung jawab pemerintah namun perlu melibatkan dan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) merupakan kegiatan pengembangan cadangan pangan masyarakat dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan masyarakat dari kerawanan pangan akibat gangguan produksi, bencana alam dan non alam serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui pembangunan fisik lumbung, pengisian cadangan pangan dan penguatan kelembagaan kelompok.

Konsep pengembangan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dilakukan pemerintah dengan melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) di sejumlah wilayah yang diyakini sebagai sentra produksi pangan Kabupaten TTU. Selanjutnya dilaksanakan pemberdayaan kelompok Lumbung Pangan Masyarakat dengan pengisian gabah yang bertujuan untuk meningkatkan volume stok cadangan pangan di kelompok dan peningkatan usaha ekonomi produktif lumbung pangan masyarakat yang dikembangkan melalui usaha penjualan gabah/beras/jagung kepada Toko Tani Indonesia yang merupakan Mitra kelompok.

Tujuan pengembangan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) adalah :

1. Meningkatkan volume stock cadangan pangan di kelompok lumbung pangan untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya terutama yang mengalami kerawanan pangan.

2. Meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota kelompok dalam pengelolaan cadangan pangan.
3. Meningkatkan modal kelompok melalui pengembangan usaha ekonomi produktif di bidang pangan
4. Mengatasi anjloknya harga pada masa panen raya dan tingginya harga pada saat paceklik dan menjadi instrument yang dibuat Pemerintah untuk menahan gejolak harga pada saat suplai melimpah maupun kurang.

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan di masyarakat selama ini adalah a) tingginya disparitas harga antara produsen dan konsumen yang mengakibatkan keuntungan tidak proporsional antara pelaku usaha sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh pangan dengan harga yang wajar; b) Selain itu terjadi gejolak kekurangan pangan di masyarakat akibat bencana alam dan inflasi.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah guna memastikan pangan di tingkat masyarakat tersedia cukup adalah melakukan kegiatan pendampingan untuk mengidentifikasi kendala yang berpotensi menghambat penyaluran bantuan pangan dan selanjutnya merumuskan alternative solusi penyelesaiannya agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap kelompok Lumbung Pangan Masyarakat sebagai mitra Toko Tani Indonesia agar meningkatkan produksi pertanian, memastikan stok/cadangan pangan tersedia cukup di masyarakat serta menjual hasil produksi ke Toko Tani Indonesia.

Selain penyediaan cadangan pangan, Pemerintah juga bertanggungjawab mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perorangan melalui beberapa kebijakan pemerintah berupa distribusi, stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan bantuan pangan. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan kepada Pihak yang melakukan pemasaran pangan.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi, Pasal 59 menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab terhadap Distribusi Pangan” yang meliputi pengembangan infrastruktur, sarana dan kelembagaan distribusi pangan.

1. Pengembangan Sistem Distribusi Pangan yang menjangkau seluruh wilayah secara efektif dan efisien meliputi pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi dan pemberian insentif.
2. Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan pangan, mempertahankan keamanan, mutu, gizi, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat yang meliputi pengaturan: (1) arus distribusi pangan antar pulau, antar provinsi dan antar kab/kota; (2) distribusi pangan dan atau mobilisasi cadangan pangan dari wilayah surplus ke wilayah yang kekurangan pangan; (3) bongkar muat di pelabuhan, bandar udara, stasiun dan terminal.
3. Perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan meliputi pengaturan arus distribusi pangan antar pulau, antar provinsi dan antar kab/kota; (2) distribusi pangan dan atau mobilisasi cadangan pangan dari wilayah surplus ke wilayah yang kekurangan pangan; (3) bongkar muat di pelabuhan, bandar udara, stasiun dan terminal.

Ketidalcukupan pasokan pangan di suatu wilayah dapat menjadi indikator tidak meratanya distribusi bahan pangan antar wilayah. Harga pangan menjadi salah satu indikator kecukupan pangan masyarakat. Harga pangan tingkat konsumen berpengaruh terhadap : (a) Akses pangan, (b) Kondisi rawan pangan, (c) Ketersediaan pasokan, (d) Kondisi permintaan, (e) Kelancaran distribusi pangan, (f) Kondisi perdagangan di pasar internasional, (g) Dampak implementasi kebijakan pemerintah, dan (h) daya beli masyarakat.

Terjadinya gangguan pada pasokan yang dapat mempengaruhi harga pangan perlu segera mendapat respon kebijakan pemerintah karena dapat menimbulkan gejolak sosial di masyarakat dan dapat mengakibatkan terganggunya kondisi sosial politik nasional. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem deteksi dini (*Early Warning System*) tentang kondisi pasokan dan harga pangan yang tepat (*up to date*) dan akurat agar dapat segera dilakukan antisipasi dan respon terhadap kemungkinan terjadinya gejolak.

Salah satu pendekatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai jumlah pasokan pangan yang akurat dari waktu ke waktu adalah dengan melakukan pemantauan jaringan distribusi pangan, yang diperoleh secara periodik atau berkala (*time series*) dari sasaran yang sama.

## 1.2. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
- 4) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206)
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa);
- 6) DPA-OPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024 Nomor : DPA/A.1/2.09.2.0.00.0.00.03.0000/001/2024, Tanggal 10 Januari 2024.
- 7) DPPA-Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024 Nomor : DPPA/A.3/2.09.2.0.00.0.00.03.0000/001/2024, Tanggal 15 Oktober 2024.

## 1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan adalah :

1. Melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap proses penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan di seluruh desa / kelurahan se Kabupaten TTU;

2. Melakukan pembinaan, pendampingan dalam rangka pengembangan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok.
3. Memberdayakan kelompok lumbung pangan di pedesaan melalui peningkatan kapasitas kelompok dalam aspek manajemen pengelolaan lumbung pangan dan pengembangan usaha Lumbung Pangan Masyarakat dalam rangka penyediaan stock/cadangan pangan di tingkat masyarakat.
4. Meningkatkan sistim pemantauan terhadap ketersediaan, distribusi dan harga pangan di wilayah kecamatan dan sekitarnya sebagai barometer perilaku harga pangan strategis di tingkat pedagang grosir/pengecer/kios-kios.
5. Meningkatkan sistim pemantuan stok, pasokan & harga pangan sebagai upaya mendeteksi harga pangan di tingkat produsen yang dapat mempengaruhi permintaan pasar.
6. Mengidentifikasi pola jaringan distribusi pangan pada pedagang grosir pada komoditi pangan antara lain beras (premium, medium dan beras local/mol), jagung pipilan, kacang (kacang tanah, kacang hijau), gula pasir, terigu (kompas, kemasan), bawang (merah & putih), telur ayam ras & minyak bimoli 620 ml.

#### 1.4. Sasaran

Sasaran pelaksanaan kegiatan Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan adalah:

1. Melakukan pemantauan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk bantuan pangan beras, daging ayam dan telur ayam ras di desa/kelurahan se Kabupaten TTU;
2. Melakukan pembinaan, pendampingan di kelompok Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten TTU;
3. Melakukan pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pada pedagang grosir/pengecer/kios-kios di 8 (delapan) Kecamatan meliputi Kecamatan Biboki Moenleu, Kecamatan Biboki Utara, Kecamatan Biboki Tanpah, Kecamatan Insana, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Insana Tengah, Kecamatan Noemuti dan Kecamatan Miomaffo Barat;
4. Melakukan pemantauan harga pangan pokok strategis di pasar-pasar tradisional berupa komoditas beras (premium, medium dan beras lokal/mol), jagung pipilan, kacang (kacang tanah, kacang hijau), gula pasir, terigu (kompas, kemasan), bawang (merah & putih), telur ayam ras & minyak bimoli 620 ml.

#### 1.5. Out put

1. Terlaksananya pemantauan dan pendampingan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Bantuan Pangan.
2. Terlaksananya pengembangan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia.
3. Terselenggaranya kegiatan pemantauan stok, pasokan & harga pangan pada pedagang grosir/pengecer/kios-kios lewat kegiatan pengumpulan data yang terkait dengan jumlah pasokan dan harga komoditi yang dijual.
4. Terlaksananya pemantauan harga pangan pokok strategis.

#### 1.6. Out Come / Hasil

1. Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah
2. Terbinanya kelompok LDPM
3. Tersedianya laporan tentang data / informasi jaringan distribusi pangan pedagang grosir/pengecer yang ada di tingkat Kecamatan.
4. Tersedianya Laporan harga pangan pokok strategis di pasar-pasar tradisional.

## BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

### 2.1. Metode Pelaksanaan Kegiatan

- A. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia dilaksanakan dalam bentuk pembinaan, pendampingan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap kelompok Lumbung Pangan Masyarakat yang tersebar di Kabupaten TTU. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dengan menghadirkan Penyuluh Lapangan Pertanian serta seluruh badan pengurus dan anggota kelompok Lumbung Pangan Masyarakat. Pendampingan terhadap kelompok Lumbung Pangan Masyarakat guna meningkatkan produksi pangan di kelompoknya guna menjaga cadangan pangan di tingkat masyarakat dan stabilisasi harga pangan di masyarakat, selanjutnya Kelompok Lumbung Pangan tersebut didorong untuk menjual hasil produksi komoditi pangannya kepada Toko Tani Indonesia yang berada di Kefamenanu.
- B. Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan tahapan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Bantuan Pangan yang diawali dengan verifikasi dan validasi data penerima bantuan bersama Bapelitbangda TTU, pemeriksaan kualitas dan kuantitas bantuan pangan serta pendampingan penyaluran CPP Bantuan Pangan. Pendampingan terhadap penyaluran Cadangan Pangan Masyarakat untuk Bantuan Pangan dilaksanakan dengan melakukan pemantauan pembagian bantuan pangan di desa/kelurahan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Kegiatan pendampingan dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang berpotensi menghambat penyaluran bantuan pangan dan selanjutnya merumuskan alternative solusi penyelesaiannya agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- C. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan stok, pasokan & harga pangan pokok strategis adalah wawancara langsung dengan pedagang grosir/pengecer/kios-kios di Kecamatan. Kegiatan pemantauan stok, pasokan & harga pangan pokok strategis Tahun Anggaran 2024 berlokasi di Kecamatan Biboki Moenleu, Kecamatan Biboki Utara, Kecamatan Biboki Tanpah, Kecamatan Insana, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Insana Tengah, Kecamatan Noemuti &

Kecamatan Miomaffo Barat. Data yang Dikumpulkan pada Kegiatan Pemantauan stok, pasokan & harga pangan pokok strategis antara lain :

- Produksi dan konsumsi komoditas pangan.
- Data pasokan dan distribusi komoditas pangan.
- Data Harga komoditi pangan pokok strategis.

Adapun cakupan variabel yang dipantau yaitu pasokan tingkat pedagang grosir/pengecer/kios-kios. Pemantauan pada tingkat pedagang grosir maupun pengecer dengan volume pasokan setiap bulan dalam bentuk kuintal seperti beras (premium, medium dan termurah), terigu dan minyak goreng.

D. Pemantauan harga pangan pokok dilaksanakan dengan cara wawancara dengan pedagang di pasar dan mengisi form kuesioner yang telah disiapkan sesuai tingkatan harga dari sebelas jenis komoditi pangan yang berlokasi di pasar-pasar potensial yang ditetapkan yaitu : Pasar Eban , Pasar Maubesi, Pasar Wini , Pasar Oenopu, Pasar Kaubele, Pasar Oelolok dan Pasar Noemuti. Selanjutnya dilaksanakan pengolahan data serta analisis akses pangan masyarakat.

## 2.2. Pembiayaan

Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan di atas adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)
1	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	12.000.000,-
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stock, Pasokan dan Harga Pangan Strategis	11.500.000,-
3	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten / Kota	11.500.000,-
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000,-

### BAB III

#### HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

##### A. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

Strategi pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dilakukan dengan melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok/gapoktan termasuk Lumbung Pangan Masyarakat dilakukan sehingga diperoleh data-data sebagai berikut :

1. Kondisi fisik lumbung pangan sebagian besar dalam kondisi baik dan terawat, sebagian besar masih memanfaatkan lumbung sebagai tempat penyimpanan cadangan pangan kelompok tani. Namun berbeda dengan beberapa Lumbung seperti pada kelompok Barbelle Desa Lokomea yang tidak terawat karena lokasinya berjarak cukup jauh dengan pemukiman penduduk sehingga tidak memungkinkan dijadikan tempat penyimpanan cadangan pangan akibat situasi yang kurang aman; lumbung pada kelompok Moin Tabua Desa Tasinifu tidak dimanfaatkan sebagai penyimpanan cadangan pangan namun digunakan sebagai tempat tinggal sementara; Lumbung pangan pada kelompok Kosat Lifau Desa Maurisu dibiarkan terlantar dan tidak dimanfaatkan dengan baik.
2. Sebagian besar lumbung pangan tidak memiliki stok cadangan pangan disebabkan karena beberapa faktor diantaranya :
  - Gabah sementara berada di tangan anggota (dipinjamkan) dan kondisi saat ini belum panen sehingga belum ada pengembalian.
  - Belum adanya kesadaran dari anggota kelompok untuk memanfaatkan lumbung pangan sebagai tempat penyimpanan cadangan pangan di tingkat masyarakat (anggota kelompok kurang aktif)
3. Kelompok Lumbung Pangan rata-rata tidak aktif berkelompok dalam pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat, hal ini disebabkan karena kurang adanya pendampingan dari petugas penyuluh lapangan maupun dari Dinas Ketahanan Pangan; ketidakpercayaan sebagian anggota kelompok dalam pengelolaan bantuan di kelompok LPM dalam bentuk uang (kurang transparan).
4. Pengelolaan bantuan pemerintah dalam bentuk uang rata-rata mengalami kemacetan akibat tidak didukung dengan kemampuan kelompok dalam pengelolaan keuangan serta kurangnya pendampingan dari petugas.

5. Bantuan pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat diberikan pada 3 (tiga) Gapoktan yaitu

- Kelompok Tani Benar Desa Motadik
- Kelompok Tani Bon-Bon Desa Fatumuti
- Kelompok Tani Roda Mandiri Desa Oepuah Selatan

Bantuan pengembangan LDPM dimanfaatkan untuk beberapa item kegiatan yaitu pembangunan gudang penyimpanan beras; pengadaan gabah/beras/jagung untuk pengisian cadangan pangan; pengadaan gabah/beras/jagung untuk pengembangan lumbung pangan. Bantuan yang diberikan pada tahun 2016 tersebut sebagian dananya belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh kelompok dan masih tersimpan di rekening kelompok tani.

#### B. Pemantauan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Untuk Bantuan Pangan

Penyaluran CPP melalui pemberian bantuan bertujuan mengurangi beban pengeluaran Penerima Bantuan Pangan sekaligus sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan, menangani kerawanan pangan, menanggulangi kekurangan pangan dan gizi, menurunkan stunting, mengendalikan gejolak harga pangan dan inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen.

Pemerintah mengalokasi sejumlah dana pada Tahun Anggaran 2025 melalui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU baik yang berasal dari APBN (Dana Dekonsentrasi TA. 2025) serta APBD II perubahan TA. 2025. Dana ini dimanfaatkan untuk melakukan serangkaian kegiatan guna melancarkan proses penyaluran Bantuan Pangan baik beras, daging ayam maupun telur ayam ras agar tepat waktu dan tepat sasaran. Kegiatan pendampingan dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang berpotensi menghambat penyaluran bantuan pangan dan selanjutnya merumuskan alternatif solusi penyelesaiannya agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

Proses diawali dari verifikasi dan validasi data penerima bantuan pangan beras yang dilakukan secara bersama-sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten TTU terhadap data penerima bantuan yang memiliki NIK yang salah, meninggal dunia, pindah penduduk ataupun yang tercatat sebagai PNS/TNI/POLRI, data yang telah diverifikasi dan validasi selanjutnya dikirim kepada Badan Pangan Nasional untuk dijadikan data Penerima Bantuan Pangan.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kualitas dan kuantitas beras di Gudang Layanan BULOG untuk selanjutnya disalurkan oleh Transporter ke titik pembagian yang telah disepakati yaitu Kantor Desa / Lurah. Dinas Ketahanan Pangan melakukan pemantauan terhadap proses penyaluran bantuan pangan di titik pembagian (kantor desa/lurah) guna memastikan bantuan pangan diterima oleh penerima bantuan dengan jumlah dan kualitas yang tepat.

1. Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk pemberian Bantuan Pangan Beras

Penerima bantuan pangan merupakan masyarakat miskin dan/atau keluarga yang mengalami rawan pangan dan gizi (Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Pemanfaatan bantuan pangan beras pada tahun 2024 diberikan secara bertahap, Tahap I s/d II diberikan kepada 41.141 Penerima Bantuan Pangan (PBP) dengan nilai 10 Kg beras per PDB per bulan untuk alokasi bulan Januari s/d Juni. Sedangkan pemberian Bantuan Pangan Beras Tahap III diberikan kepada 42.665 PBP dengan nilai 10 Kg beras per PDB per bulan untuk alokasi bulan Agustus, Oktober dan Desember 2024.

Tabel 1. Alokasi Bantuan Pangan Beras Tahun 2024

Bulan	Tahap I			Tahap II			Tahap III			Total
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Agust	Okt	Des	
Jumlah PBP (KK)	41.141	41.141	41.141	41.141	41.141	41.141	42.665	42.665	42.665	374.841
Jumlah Beras (Kg)	411.410	411.410	411.410	411.410	411.410	411.410	426.650	426.650	426.650	3.748.410

2. Penyaluran Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras untuk pemberian Bantuan Pangan Sasaran penerima bantuan pangan Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras adalah Keluarag Berisiko Stunting (KRS) hasil koordinasi dengan BKKBN. BUMN Pangan menyalurkan Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras di Kabupaten Timor Tengah Utara kepada 4.174 KRS yang diberikan secara bertahap dan diberikan setiap bulan selama 6 (enam) bulan mulai bulan Januari s/d Juni sejumlah 1 (satu) ekor ayam dengan berat ± 1 kg dan telur ayam ras sejumlah 1 pack isi 10 butir.

Tabel 2. Alokasi Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Tahun 2024

Bulan	Tahap I			Tahap II			Total
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	
Jumlah KRS (KK)	4.174	4.174	4.174	4.174	4.174	4.174	25.044
Jumlah Daging Ayam (ekor)	4.174	4.174	4.174	4.174	4.174	4.174	25.044

Jumlah Telur Ayam (butir)	41.740	41.740	41.740	41.740	41.740	41.740	250.440
---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Pendampingan terhadap proses penyaluran Bantuan Pangan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU yang melibatkan seluruh ASN pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU tidak dapat menjangkau seluruh desa/kelurahan di Kabupaten TTU, hal ini disebabkan karena keterbatasan dana /anggaran yang tersedia.

Berdasarkan hasil monitoring terhadap penyaluran Bantuan Paangan tahun 2024 ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Setelah dilakukan verval dan penggantian Penerima Bantuan Pangan masih ditemukan data PBP yang dispute/salah
- b. Masih ditemukan kesalahan procedural dalam penyaluran Bantuan Pangan seperti adanya pungutan liar saat pembagian bantuan pangan, adanya kompensasi kerja bakti yang harus dilakukan sebelum menerima bantuan pangan, adanya pemotongan jumlah beras saat pembagian.
- c. Kurangnya koordinasi antar pemimpin wilayah (kepala desa / lurah) dengan masyarakat penerima bantuan sehingga terjadi penundaan waktu penyaluran bantuan pangan.
- d. Ditemukan kualitas bantuan pangan ayam ras dan telur ayam ras yang telah rusak sehingga tidak bisa dikonsumsi.

Untuk mengatasi permasalahan yang ditemui saat penyaluran bantuan pangan di atas maka Dinas Ketahanan Pangan melakukan pembenahan/perbaikan data penerima bantuan pangan melalui verifikasi dan validasi yang lebih akurat bersama pihak-pihak yang berkompeten serta melakukan pengawalan dalam perbaikan data BNBA. Selain itu koordinasi dengan stakeholders terkait dan pendampingan yang lebih intensif dilakukan terutama pada wilayah-wilayah yang dilaporkan atau yang rentan bermasalah sehingga mengurangi dampak yang ditimbulkan.

C. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan

Adapun hasil Analisis Pengawasan Jalur Distribusi Pangan Pedagang Grosir adalah :

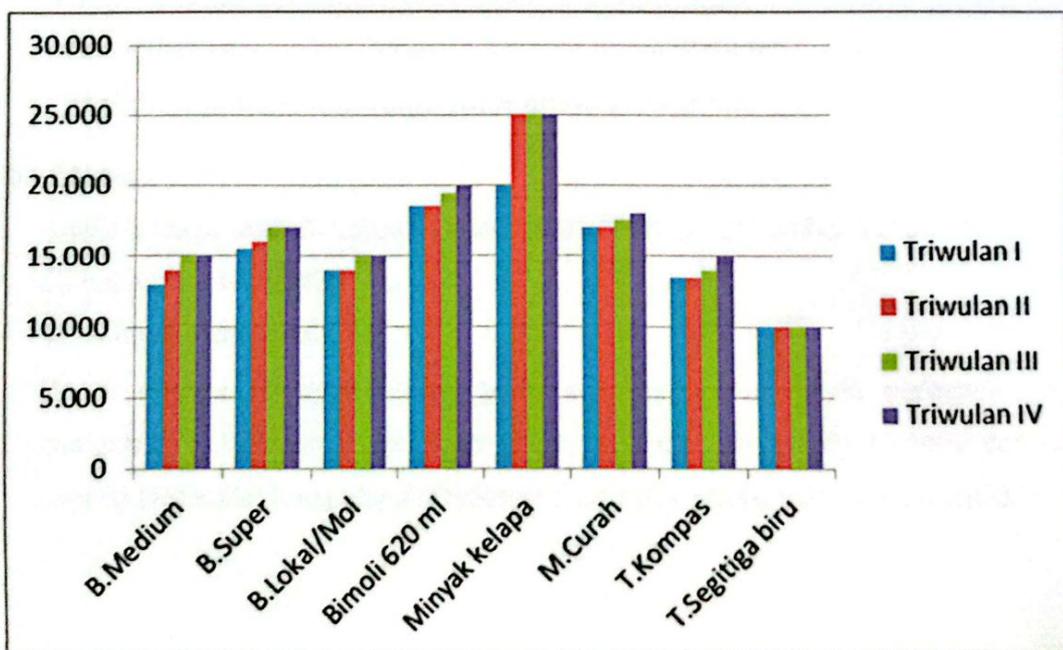
- Analisis Pola Distribusi komoditi (beras, minyak goreng dan terigu) sebagai berikut:

Tabel 3. Harga Komoditi Pangan Pokok Strategis

NO	KOMODITI	BULAN			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Beras :				
	- Medium 2	13.000	14.000	15.000	15.000
	- Super	15.500	16.000	17.000	17.000
	- Lokal / Mol	14.000	14.000	15.000	15.000
2	Minyak Goreng :				
	- Bimoli (620 ml)	18.500	18.500	19.500	20.000
	- Kelapa	20.000	25.000	25.000	25.000
	- Tanpa Merk (curah)	17.000	17.000	17.500	18.000
3.	Terigu :				
	- Kompas	13.500	13.500	14.000	15.000
	- Segitiga Biru	10.000	10.000	10.000	10.000

Dari data di atas maka dapat digambarkan perkembangan harga masing - masing komoditi pangan dari selama Triwulan I - IV Tahun 2024 melalui tabel sebagai berikut :

Gambar 1. Grafik Perkembangan Harga Komoditi Pangan Pokok



**a. Beras**

Pemantauan stok, pasokan & harga pangan dilakukan terhadap 3 jenis kualitas beras (*Medium, Super dan lokal/mol*) pada pedagang grosir di Kota Kefamenanu dan pedagang grosir di Kecamatan Biboki Moenleu, Insana, Insana Utara, Biboki Utara dan Kecamatan Insana Tengah dengan gambaran sebagai berikut :

📌 **Beras Medium**

Harga rata-rata beras medium pada pedagang grosir di Pasar Kota Kefamenanu (Pasar Baru dan Pasar Lama) dan pasar kecamatan periode Januari sampai dengan Desember 2024 berkisar Rp. 13.000/Kg - Rp. 15.000/Kg.

Pada periode ini komoditi beras mengalami perubahan harga sekitar Rp. 2.000,,-. Harga beras cenderung stabil karena pasokan beras dari luar daerah stabil sehingga ketersediaan beras medium mencukupi kebutuhan masyarakat.

📌 **Beras super**

Harga rata-rata beras super berkisar antara Rp. 15.500,- sampai dengan Rp. 17.000,- dan harga tertinggi pada bulan Juli hingga Desember sebesar Rp. 17.000,-/Kg. Hal ini disebabkan karena pada bulan Juli - Desember persediaan beras super agak berkurang sedangkan kebutuhan akan beras meningkat.

📌 **Lokal / Mol**

Harga rata-rata beras Lokal/Mol Triwulan I sebesar Rp. 14.000,-. dan tidak mengalami perubahan harga hingga bulan Juni dengan harga jual sebesar Rp. 14.000/kg. Hal ini disebabkan karena beras mol merupakan beras yang diproduksi sendiri oleh daerah sekitar kota Kefamenanu sehingga tidak membutuhkan biaya transportasi yang mahal dan harga tersebut masih dapat terjangkau oleh konsumen / pembeli. Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik.

**b. Minyak**

Analisis harga minyak goreng periode Januari hingga Desember Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel grafik.

📌 **Minyak Bimoli (620 ml).**

Harga rata-rata minyak bimoli pada saat pemantauan pada pedagang grosir mengalami perubahan harga. Pada periode Januari sebesar Rp 18.500,- dan pada periode Desember mengalami perubahan yang tidak berarti yaitu sebesar Rp. 20.000,-

#### ✚ Minyak lokal / Kelapa

Harga rata-rata minyak lokal / kelapa pada tingkat pedagang grosir di pusat pasar Kota Kefamenanu dan beberapa Pasar Kecamatan mengalami kenaikan harga. Pada periode Januari - Maret sebesar Rp 20.000,-/liter sedangkan pada periode April – Desember mengalami kenaikan harga sebesar Rp. 5.000,-. Salah satu faktor yang menyebabkan mahalnya harga minyak kelapa karena persediaan buah kepala yang kurang dan sudah tidak terlalu banyak masyarakat yang memasak minyak kelapa bahkan beberapa penjual mengakui harga yang mahal karena minyak kelapa didatangkan dari kabupaten lain seperti Kabupaten Belu dan Malaka sehingga berpengaruh langsung terhadap harga yang dijual ke konsumen.

#### ✚ Minyak Tanpa merk (Curah)

Harga rata-rata minyak tanpa merk (curah) pada lokasi pemantauan masih stabil pada periode Januari hingga Juni sebesar Rp. 17.000/liter dan mengalami kenaikan harga Rp 1.000,- pada periode Desember 2024.

### c. Terigu

Analisis harga terigu periode Januari hingga periode Desember dapat dilihat pada table.

#### ✚ Kompas

Harga rata-rata terigu kompas pada pedagang grosir di pusat pasar Kota Kefamenanu dan grosir kecamatan pada bulan Januari sampai dengan Juni tidak mengalami kenaikan harga yaitu dengan harga jual sebesar Rp. 13.500/kg disebabkan karena adanya hari raya besar dan harga tersebut tetap tidak berubah karena pedagang telah mengambil persediaan komoditi terigu kompas dalam jumlah / stok yang cukup.

#### ✚ Segitiga Biru

Harga rata-rata terigu segitiga biru masih stabil dan tidak mengalami perubahan dari periode Januari hingga Desember 2024 yaitu sebesar Rp. 10.000/kg.

## D. Pemantauan Harga Pangan Pokok Strategis

Kegiatan Pemantauan Harga Pangan Pokok Strategis pada bidang distribusi dan cadangan pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki sasaran/kegiatan Pemantauan Harga Pangan Pokok dengan capaian 100 %. Sasaran sesuai dengan perjanjian kinerja diukur dengan beberapa indikator kinerja yang disusun lebih

berorientasi pada hasil. Pengukuran sasaran tersebut dicapai dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja seperti dijelaskan dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 5. Indikator Kinerja Pemantauan Harga Pangan Pokok

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Data Dukung
Pemantauan Harga Pangan Pokok	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan Harga pangan Pokok yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	100 %	Informasi dan data harga pangan pokok

Kegiatan Pemantauan Harga Pangan Pokok dilakukan di tingkat pedagang yang berada di beberapa pasar yang tersebar di kecamatan-kecamatan, data dikumpulkan secara rutin atau periodik untuk dapat digunakan sebagai bahan dalam membuat analisis harga. Semua informasi ini diperoleh dari para pedagang yang berada di pasar-pasar.

Cakupan variabel yang dipantau pada kegiatan Pemantauan Harga Pangan Pokok yaitu harga 11 (sebelas) komoditi yang ada di pedagang yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada. 11 (sebelas) Komoditi yang dipantau di tingkat pedagang pengecer pada kegiatan pemantauan harga pangan pokok antara lain :

1. Beras
  - a. Beras Super
  - b. Beras Medium
  - c. Beras Lokal
2. Jagung
  - a. Pipilan Kuning
3. Ubi
  - a. Ubi Kayu
4. Kacang
  - a. Kacang Kedelai
  - b. Kacang Hijau
  - c. Kacang Tanah
5. Daging
  - a. Daging Sapi
  - b. Daging Ayam Broiler
  - c. Daging Ayam Kampung
6. Telur Ayam
  - a. Telur Ayam Ras
  - b. Telur Ayam Buras

7. Gula Pasir
  - a. DN Putih
  - b. DN Merah
8. Terigu
  - a. Terigu Kompas (Kemasan)
  - b. Terigu Segitiga Biru
  - c. Terigu Gatot Kaca/Sejenisnya
9. Minyak Goreng
  - a. Bimoli
  - b. Lokal (kelapa)
  - c. Tanpa Merk (Curah)
10. Cabai
  - a. Cabai Merah Keriting
  - b. Cabai Biasa (Rawit)
11. Bawang
  - a. Bawang Merah
  - b. Bawang Putih

### **Analisis Capaian Perjanjian Kinerja**

Secara keseluruhan capaian kinerja Kegiatan Pemantauan Harga Pangan Pokok pada bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara adalah 100 %.

Pemantauan harga pangan pokok dilakukan ditingkat konsumen (pedagang di pasar-pasar) yang tersebar di beberapa kecamatan. Kegiatan pemantauan harga pangan pokok ini dilaksanakan sebagai respon terhadap kenaikan harga komoditas pangan yang terjadi karena peningkatan permintaan menjelang hari raya keagamaan, inflasi, hingga fenomena cuaca dan iklim seperti el nino, oleh karena itu penetapan harga berperan penting untuk mempengaruhi keberhasilan sebuah usaha. Pada dasarnya harga tidak hanya mencerminkan nilai suatu produk atau layanan saja tetapi harga juga mengambil peran yang cukup penting pada ekspektasi pelanggan, mempertahankan pangsa pasar dan keberlangsungan usaha.

Tahapan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan Pemantauan Harga Pangan Pokok adalah :

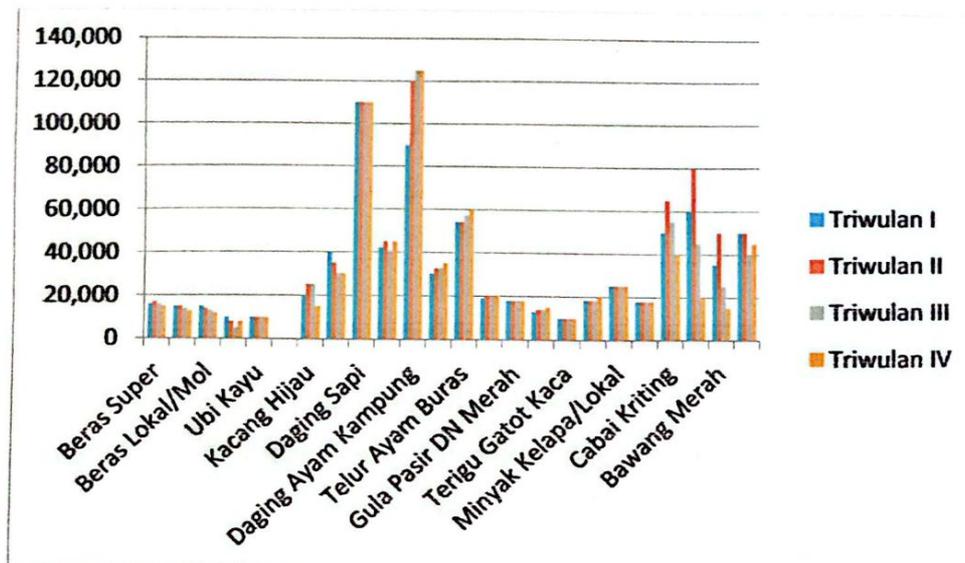
- a) Harga pangan eceran dikumpulkan dari beberapa pasar yang tersebar di 8 Kecamatan
- b) Pasar tempat pengambilan data harga pangan pokok adalah pasar yang menyediakan beraneka ragam jenis barang dagangan serta memiliki banyak pedagang pengecer yang berjualan dan melayani kebutuhan masyarakat banyak dan dapat menjamin kontinuitas pencatatan data harga

- c) Data yang dicatat adalah rata-rata harga bahan pangan pokok/strategis yang diperoleh dari pedagang pengecer dipasar
- d) Data yang telah dianalisa dikirim ke Bagian Ekonomi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Timor Tengah Utara

Tabel 5. Harga Pangan Pokok beberapa komoditi adalah sebagai berikut:

No	Komoditi	Satuan	Triwulan I (Rp)	Triwulan II (Rp)	Triwulan III (Rp)	Triwulan IV (Rp)
1	Beras Super	Kg	16.000	17.000	16.000	15.000
2	Beras Medium	Kg	15.000	15.000	14.000	13.000
3	Beras Lokal/Mol	Kg	15.000	14.000	13.000	12.000
4	Jagung Kuning	Kg	10.000	8.000	5.000	8.000
5	Ubi Kayu	Kg	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Kacang Kedelai	Kg	0	0	0	0
7	Kacang Hijau	Kg	20.000	25.000	25.000	15.000
8	Kacang Tanah	Kg	40.000	35.000	30.000	30.000
9	Daging Sapi	Kg	110.000	110.000	110.000	110.000
10	Daging Ayam Ras	Kg	42.000	45.000	40.000	45.000
11	Daging Ayam Kampung	Ekor	90.000	120.000	125.000	125.000
12	Telur Ayam Ras	Kg	30.000	32.500	32.500	35.000
13	Telur Ayam Buras	Kg	54.000	54.000	57.000	60.000
14	Gula Pasir DN Putih	Kg	19.000	20.000	20.000	20.000
15	Gula Pasir DN Merah	Kg	18.000	18.000	18.000	18.000
16	Terigu Kompas	Kg	13.000	14.000	14.000	15.000
17	Terigu Gatot Kaca	Kg	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Minyak Goreng Bimoli 620 ml	Btl	18.500	18.500	18.500	20.000
19	Minyak Kelapa/Lokal	Btl	25.000	25.000	25.000	25.000
20	Minyak Curah	l.tr	18.000	18.000	18.000	18.000
21	Cabai Kriting	Kg	50.000	65.000	55.000	40.000
22	Cabai Biasa	Kg	60.000	80.000	45.000	20.000
23	Bawang Merah	Kg	35.000	50.000	25.000	15.000
24	Bawang Putih	Kg	50.000	50.000	40.000	45.000

Dari data di atas dapat digambarkan perkembangan harga masing - masing komoditi pangan selama satu tahun (rata-rata per triwulan. yaitu triwulan I - IV Tahun) melalui tabel sebagai berikut :



Gambar 2. Grafik Perkembangan Harga Pangan Pokok

### 1. Beras

Beras sampai saat ini masih tetap menjadi konsumsi makanan pokok masyarakat Indonesia pada umumnya dan Kabupten Timor Tengah Utara pada khususnya. Beras mudah dimasak, harga terjangkau dan tersedia hampir diseluruh daerah di Indonesia, apalagi kandungan gizi beras relatif lebih baik kalau dibandingkan dengan bahan pokok lain seperti, jagung, ketela pohon dan umbi-umbian yang lain. Sehingga Pemerintah menempatkan komoditas ini sebagai komoditas pangan strategis.

Harga rata-rata beras premium ditingkat pedagang konsumen yang ada di beberapa pasar yang menjadi lokasi pantauan harga pangan pokok periode Januari sampai Desember adalah Rp. 16.000/kg, sedangkan harga rata-rata untuk beras medium adalah Rp. 14.250 dan harga rata-rata beras lokal/beras mol adalah Rp. 13.500/kg

### 2. Jagung Pipilan Kering

Kebutuhan akan jagung di wilayah kabupaten Timor Tengah Utara dapat terpenuhi dimana harga rata-rata jagung pipilan kering dari Januari hingga Desember adalah Rp. 7.750/kg

### 3. Ubi Kayu

Harga ubi kayu dari tri wulan I sampai tri wulan ke-IV tidak mengalami kenaikan dan tetap pada harga Rp. 10.000, maka rata-rata harga ubi kayu adalah Rp. 10.000/kg.

#### 4. Kacang-kacangan

Kebutuhan masyarakat kabupaten Timor Tengah Utara akan kacang-kacangan dalam hal ini kacang hijau dan kacang tanah dapat terpenuhi, dimana harga rata-rata kacang hijau ditingkat pedagang eceran adalah Rp. 21.250/Kg dan kacang tanah adalah Rp. 33.750/Kg sedangkan kacang hijau tidak dijual ditingkat pedagang eceran tetapi hanya tersedia pada pengrajin tempe tahu.

#### 5. Daging

Kebutuhan akan daging sapi dan daging ayam ras dapat terpenuhi. Harga rata-rata daging sapi di tingkat pedagang/penjual daging sapi adalah Rp. 110.000/kg. Harga daging sapi tidak mengalami perubahan harga sedangkan harga rata-rata daging ayam ras adalah Rp. 43.000/kg.

#### 6. Minyak

Kebutuhan akan minyak goreng pada kabupaten Timor tengah Utara terpenuhi dimana harga rata-rata minyak bimoli 620 ml adalah Rp. 18.875/btl, minyak kelapa Rp. 25.000/btl dan minyak curah /minyak kita Rp. 18.000/ltr.

#### 7. Terigu

Harga rata-rata terigu kompas pada pedagang eceran yaitu Rp. 14.000/kg sedangkan harga rata-rata terigu gatot kaca masih stabil dan tidak mengalami perubahan dari periode Januari hingga Desember 2024 yaitu sebesar Rp. 10.000/kg.

#### 8. Bawang

Bawang merah merupakan salah satu komoditas yang menguntungkan karena harganya yang relatif stabil dan permintaannya yang terus meningkat. Kebutuhan akan bawang merah terpenuhi. Harga rata-rata bawang merah adalah Rp. 31,250/Kg, sedangkan ketersediaan bawang putih terpenuhi, dimana harga rata-rata bawang putih sebesar Rp. 46.250/kg.

#### 9. Cabai

Harga cabai mengalami fluktuasi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan permintaan cabai antara lain: cuaca yang mempengaruhi waktu tanam cabai, gagal panen, hari-hari besar keagamaan dan hajatan yang diadakan oleh masyarakat. Harga rata-rata cabai kecil adalah Rp. 51.250/kg sedangkan harga rata-rata cabai kriting adalah Rp. 52.500/kg

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. KESIMPULAN

Kondisi yang ditemui saat ini di lapangan adalah sebagian besar kelompok lumbung pangan masyarakat tidak aktif lagi dalam kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat. Hal ini ditandai dengan kondisi lumbung yang kurang terawat dan tidak dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan cadangan pangan; tidak tersedianya stock cadangan pangan di lumbung; tidak tertibnya administrasi kelompok terkait simpan pinjam gabah dll, macetnya pengembalian usaha simpan pinjam kelompok lumbung pangan.

Beberapa komoditi seperti beras, minyak goreng dan terigu tidak mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan pada awal tahun (Januari hingga Maret), kenaikan harga terjadi pada bulan tertentu seperti pada saat hari besar keagamaan yaitu Natal dan Idul Fitri dan acara adat / keagamaan lainnya seperti pada awal Bulan November karena ketersediaan / stok komoditi pangan tersebut pada produsen sangat terbatas dibandingkan dengan permintaan konsumen / pasar.

### 4.2. SARAN

Pengembangan LPM merupakan salah satu upaya strategis dalam membangun sistem ketahanan pangan di tingkat masyarakat. Keberadaan LPM menjadi sangat relevan karena memberikan kemudahan akses pangan, baik secara fisik maupun ekonomi (daya beli).

Pengelolaan cadangan pangan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif dilakukan dengan prinsip perputaran stok (*revolving stock*). Perputaran stok dilakukan melalui pembelian gabah dengan stok gabah yang tersedia / beredar di kelompok. Untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani, pembelian gabah diutamakan pada saat panen raya.

Strategi pengembangan kelembagaan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat adalah melalui:

- a. Perbaiki administrasi dan manajemen kelompok LPM (Lumbung Pangan Masyarakat)
- b. Sebagian besar kepengurusan kelompok LPM sudah tidak aktif lagi, oleh karena itu diperlukan peremajaan pengurus kelompok tani yang diprakarsai oleh PPL Pertanian

pada desa setempat, untuk selanjutnya didampingi secara berkala oleh Dinas Ketahanan Pangan.

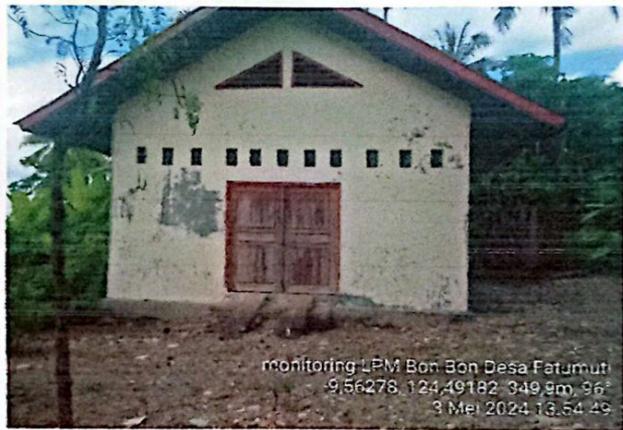
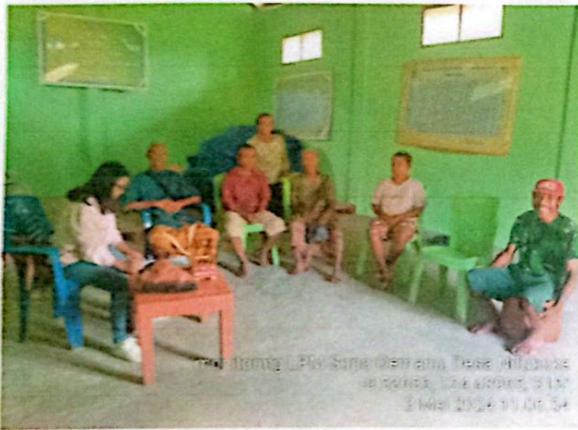
- c. Pelatihan kepada para pengurus kelompok LPM (Lumbung Pangan Masyarakat) mengenai administrasi pembukuan kelompok LPM (Lumbung Pangan Masyarakat) dan pembinaan dalam upaya pengembangan LPM (Lumbung Pangan Masyarakat)
- d. Peningkatan partisipasi anggota kelompok LPM (Lumbung Pangan Masyarakat) dalam kegiatan simpan pinjam sehingga terjadi peningkatan secara berkala.
- e. Pengembangan cadangan pangan berlandaskan usaha ekonomi produktif kelompok.
- f. Pengisian LPM melalui dana APBD II di lumbung pangan yang telah dibangun sebelumnya yang bertujuan untuk memantapkan penyediaan pangan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan kelompok.
- g. Perlu adanya pendampingan dan pengawasan dari Aparat Desa setempat terkait pengembangan lumbung pangan
- h. Perlu adanya legitimasi dan pendampingan, dukungan dari Pemerintah Desa melalui intervensi Dana Desa
- i. Pendampingan berkala dari Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

Kegiatan pemantauan pasokan, stock dan harga pangan pokok strategis harus dilakukan secara rutin agar dapat diketahui fluktuasi harga komoditi sehingga jika terjadi kenaikan harga atau perubahan harga yang signifikan di tingkat pedagang grosir menjadi masukan bagi Pemerintah atau instansi terkait dengan tujuan menghindari penimbunan komoditi dan untuk dapat menstabilkan harga komoditi yang dipasarkan.

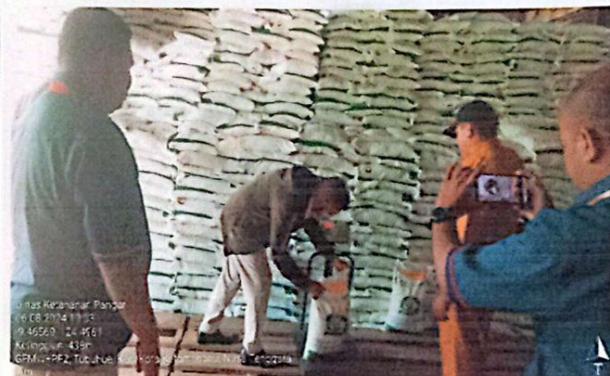
#### 4.3. PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024.

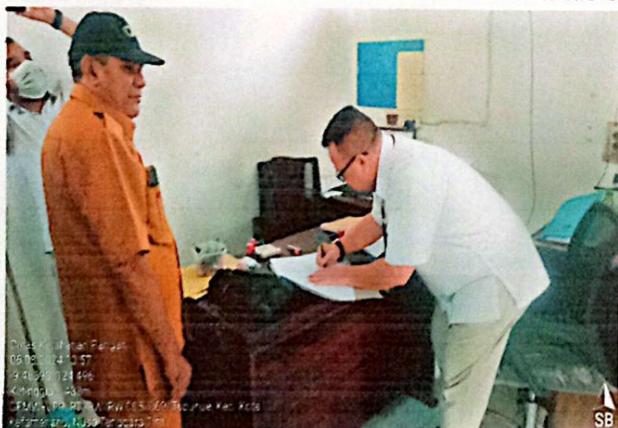
# DOKUMENTASI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN USAHA MASYARAKAT



DOKUMENTASI KEGIATAN PENYALURAN CPP TAHUN 2024 DI KABUPATEN TTU



Pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras CPP di Gudang Layanan BULOG



Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Kualitas dan Kuantitas Beras CPP



## Penandatanganan Berita Acara Verval Bantuan Pangan

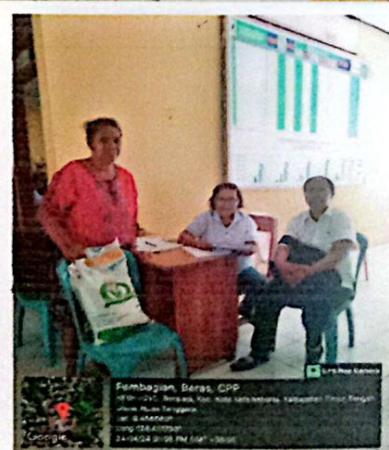
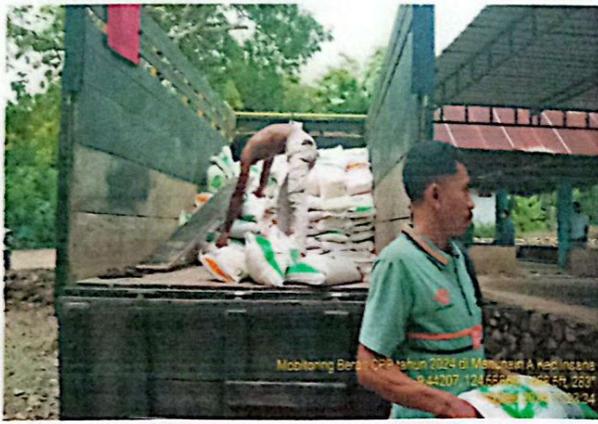


## Sosialisasi Penyaluran CPP Bantuan Pangan Tahun 2024



## Pencanangan penyaluran Bantuan Beras CPP oleh Pemerintah Daerah Dokumentasi Penyaluran Bantuan Beras CPP di Desa / Kelurahan di Kabupaten TTU





Guna mendukung upaya mencapai tujuan diatas maka dialokasikan sejumlah dana yang digunakan untuk pendampingan, pembinaan dan bimbingan teknis terhadap kelompok Lumbung Pangan Masyarakat serta pendampingan penyaluran bantuan pangan yang dilakukan dengan kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Tabel 3. Rincian Penggunaan Dana Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Pemantauan Penyaluran CPP

No	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp)	Realisasi	
			Anggaran	%
1	Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	12.000.000,-	5.500.000,-	45,83%
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000,-	26.200.000,-	87,33%